

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara eksplisit Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan pada setiap Kabupaten maupun Kota. Termasuk pemerintahan Kota Bandung telah mengadakan Pilkada pada tahun 2008 untuk memilih Walikota masa bakti 2008-2013. Sebagai wahana partisipasi politik masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Bandung, salah satu organisasi masyarakat Islam yaitu Persatuan Islam (Persis) merupakan masyarakat multikultural yang ikut berpartisipasi pada Pilkada.

Persis sebagai organisasi masyarakat Islam merupakan wadah dan bagian dari masyarakat yang terkait dengan politik Indonesia, salah satunya di tingkat Pimpinan Daerah Persis Kota Bandung.

Menilik dari sejarah, Kota Bandung merupakan Kota kelahiran Persis, itu artinya pusat peradaban Persis terletak di Kota Bandung. Sepak terjang Persis di Kota Bandung dalam perpolitikan sudah ada dari dulu sejak lahirnya Persis pada tahun 1923. Tokoh-tokohnya pun begitu familiar, seperti A. Hasan, Isa Anshari, M. Natsir dan yang lainnya. Kiprah mereka begitu menonjol dan diperhitungkan di kalangan masyarakat lainnya. Bahkan melalui Persis ini, M. Natsir dapat bergaul dan mendapat didikan dari tokoh utama Persis, yaitu Ahmad Hasan.¹

¹Thahir Luth, *M. Natsir : Dakwah dan Pemikirannya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, hal. 29

Kiprah Persis di Kota Bandung saat ini menjadi penting. Karena selain untuk menunjukkan eksistensi Persis sebagai organisasi masyarakat Islam, juga sebagai bentuk untuk ikut memajukan Kota Bandung dalam berbagai aspek terutama aspek keagamaan. Pemikiran atau gagasan seperti apa yang sudah ditelurkan Persis di Kota Bandung dalam menjalankan misi dakwah Islamiyyah dan untuk kemajuan Kota Bandung secara umum. Salah satu momentumnya adalah ketika dilaksanakannya Pilkada.

Sejalan dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistim pemerintahan termasuk sistim penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dan Pilkada Kota Bandung tahun 2008 merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang no 32 tahun 2004 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakilnya.

Persis sebagai organisasi masyarakat Islam yang memegang Alquran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang utama tentunya memiliki pemahaman bahwa memilih seorang pemimpin merupakan sebuah kewajiban. Seorang pemimpin merupakan hal yang niscaya dalam sebuah kelompok masyarakat termasuk di tingkat Pemerintahan Daerah.²

Tidak semua orang bisa menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin harus memiliki kredibilitas yang tinggi, adil, bijaksana dan memasyarakat. Tugas utama pemimpin adalah membina dan mengembangkan kebijaksanaan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada Pilkada Kota Bandung tahun 2008 pasangan calon yang maju berjumlah tiga, yaitu Dada Rosada dan Ayi Vivananda yang diusung oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan, Taufikurrahman dan Abu Syauqi yang diusung oleh PKS dan PAN, serta Hudaya Prawira dan Nahadi berasal dari calon independen.³

Berdasarkan tasykil 2004 PP Persis yang memutuskan bahwa jama'ah Persis harus mendukung partai politik yang berazaskan Islam dan tidak menyebut nama partainya.⁴

Lalu bagaimana analisa masalah calon yang dipilih oleh jama'ah Persis apakah yang didukung oleh partai Islam, atau Persis mendukung sepenuhnya karena figur calon dianggap paling ideal.

² Hasil wawancara dengan Iman Setiawan Latief

³ Detikbandung, Minggu 22 Juni 2008.

⁴ *Op. Cit.*

Hal demikian yang memerlukan penelitian lebih lanjut, apakah pemetaan keberpihkan politik Persis terhadap partai Islam dan calon bersifat absolut, atau Persis memiliki cara pandang tersendiri.

Oleh sebab itu, saya tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang peranan Persis dalam perpolitikan di Kota Bandung. Maka dari itu judul yang saya ajukan dalam penelitian ini adalah **Partisipasi Persis dalam Pilkada Kota Bandung Tahun 2008.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Tipologi Partisipai Politik Persis dalam Pilkada Kota Bandung tahun 2008?
2. Bagaimana Perilaku Memilih Persis dalam Pilkada Kota Bandung tahun 2008?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Tipologi dan Perilaku Memilih Persis dalam Pilkada Kota Bandung tahun 2008?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan:
 1. Untuk mengetahui Tipologi Partisipasi Politik Persis dalam Pilkada Kota Bandung tahun 2008.

2. Untuk mengetahui Perilaku Memilih Persis dalam Pilkada Kota Bandung tahun 2008.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Tipologi dan Perilaku Memilih Persis dalam Pilkada Kota Bandung tahun 2008.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari :

- a. Manfaat teoritis; yaitu untuk memberikan kontribusi bagi upaya pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang kajian Siyasah Dusturiyah.
- b. Manfaat praktis; yaitu sebagai manifestasi dalam kehidupan berpolitik.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam buku *Political Sciology : A Critical Introduction*, Keith Fauls sebagaimana dikemukakan oleh Damsar, mendefinisikan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan.⁵

Beberapa sarjana merumuskan beberapa definisi partisipasi politik, yaitu di antaranya sebagai berikut :

1. Miriam Budiardjo⁶, dia mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekeompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan

⁵ Keith Fauls, *Political Sciology : A Critical Introduction* dalam Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, 1990, hal 180.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hal. 183

secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

2. Ramlan Surbakti⁷, dia mendefinisikan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
3. Michael Rush dan Philip Althof⁸, mereka mengatakan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.
4. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson⁹, mereka mengungkapkan bahwa partisipasi politik...kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi kebijakan oleh pemerintah.
5. Herbert Mc. Closky¹⁰, dia mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

⁷Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta, 1992, hal. 141

⁸Michael Rush dan Philip Althof, *Pengantar Sosiologi Politik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 120

⁹Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 97

¹⁰Herbert Mc. Closky dalam Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta, 1992, hal. 183-184

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik beberapa kriteria dari pengertian partisipasi politik, yaitu :

1. Menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi, partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat objektif dan bukan subjektif.
2. Kegiatan politik warganegara biasa atau perorangan sebagai warga negara biasa yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (perantara).
3. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan bahkan penolakan juga terhadap keberadaan figur para pelaku politik dan pemerintah.
4. Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya mempengaruhi pemerintah tanpa peduli efek yang akan timbul gagal ataupun berhasil.
5. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan (konvensional) maupun dengan cara yang diluar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence).
6. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Dalam negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat dalam arti partisipasi politik maka itu lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya partisipasi politik menunjukkan bahwa warga negara

mengikuti dan memahami masalah politik serta ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Kehidupan bernegara dalam Islam menitikberatkan adanya ikatan antara umat (rakyat) dan pemerintah sebagai upaya membangun negara yang *thayyibah*. Pemerintah dapat menentukan kebijakan umum demi kepentingan bersama. Karena berkaitan dengan publik, kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan umum. Zayn al-,Abidin Ibn Ibrahim Ibn hujaim al-Hanafi berpendapat : “kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada masalah”.¹¹

Secara umum bentuk partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu¹²:

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap orang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan public, mengajukan alternative kebijakan public yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah danlain-lain.
2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
3. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap system politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.

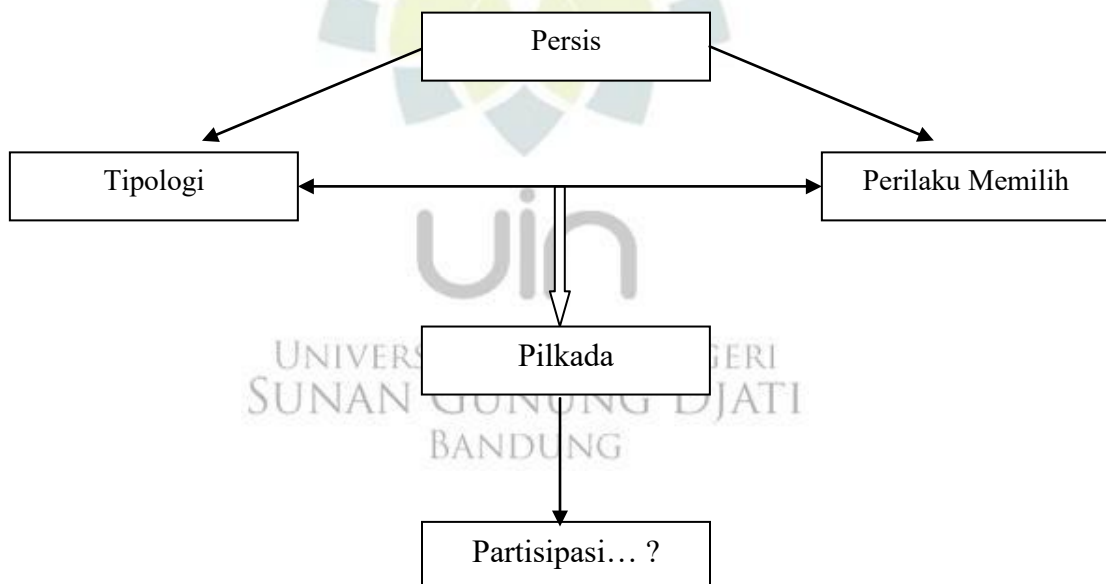
¹¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 95

¹² *Op. Cit*, hal. 142

Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan kepala daerah merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni memilih atau tidak memilih dalam pemilihan kepala daerah tersebut.

Dalam kaitannya dengan Pilkada Kota Bandung, apakah tipologi Persis berbanding lurus dengan perilaku memilihnya sehingga melahirkan partisipasi politik yang diharapkan serta mampu mewujudkan seorang pemimpin yang ideal.

Agar mudahnya dalam penelitian ini, maka dibuatkan skema penelitian sebagai berikut :



E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.¹³ Yaitu mendeskripsikan data-data yang di ambil dari lapangan berupa hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan Pilkada Kota Bandung.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan beberapa metode, yaitu sebagai berikut :

- a. *Snowballing*, yaitu melakukan wawancara (*interview*) dengan Iman Setiawan Latief, kemudian beliau menyuruh untuk mewawancarai Jejen Jaenudin karena dia sebagai sekretaris, lalu Jejen menyuruh untuk melakukan wawancara dengan Iip Saripudin karena beliau adalah bendahara, dan Iip menyuruh untuk melakukan wawancara dengan Achmad Faisal karena dia adalah kbid. SDM & O, serta Achmad menyuruh untuk melakukan wawancara dengan Uhud Sholehudin karena dia adalah kbid. Bang-bosek.
- b. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan partisipasi Persis dalam Pilkada Kota Bandung tahun 2008, seperti : Qanun Asasi / Qanun Dakhili Persis dan surat edaran untuk memilih pasangan calon.

¹³ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hal. 111

- c. Studi kepustakaan (*Library research*), yaitu dengan menelaah buku-buku yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Partisipasi Politik Persis dalam Pilkada Kota Bandung.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, diklasifikasikan pada data primer dan data sekunder.¹⁴

a. Sumber primer, yakni sumber data yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian serta menjadi rujukan utama dalam penyusunan skripsi.

Adapun sumber data tersebut adalah:

1. QA/QD Persis Kota Bandung
2. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Partisipasi Persis dalam Pilkada Kota Bandung tahun 2008.
3. Hasil wawancara dengan Iman Setiawan Latief, Jejen Jaenudin, Iip Saripudin, Achmad Faisal dan Uhud Sholehudin.
- b. Sumber sekunder, berupa sumber data pendukung antara lain:
 1. Buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas, seperti:
 - a. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik
 - b. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik

2. Dokumen

3. Artikel

4. Makalah

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Logos, Jakarta, 1999, hal. 64

4. Analisis Data

Adapun secara garis besar analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data yang bersifat deskriptif, yaitu data hasil wawancara dan pengamatan.
- b. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka penelitian.
- d. Menyimpulkan hasil penelitian.



